



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA**

NOMOR 36 TAHUN 2020

TENTANG

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KOTA SURABAYA TAHUN 2021**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pembentukan Peraturan Daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah dan untuk menjaga agar Peraturan Daerah tersebut tetap berada dalam kesatuan sistem hukum nasional, maka perencanaan penyusunan Peraturan Daerah harus dilakukan dalam suatu Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Walikota Surabaya Nomor : 180/8953/436.1.2/2020 tanggal 2 Oktober 2020 Perihal : Penyampaian Daftar Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021;
 2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 172/5863/436.5/2020 tanggal 23 September 2020 Perihal : Pemberitahuan;
 3. Surat Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 125/Kom A/Eks/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 Perihal Usulan Propemperda Komisi A;
 4. Surat Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 92/KomisiB/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 5. Surat Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 094/Kom.C/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 6. Surat Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 68/Komisi.D/IX/2020 tanggal 28 September 2020 Perihal : Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 7. Surat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya Nomor : 19/BPP/XI/2020 tanggal 5 Nopember 2020 perihal Usulan Rancangan Peraturan Daerah;
 8. Berita Acara Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya bersama Bagian Hukum Kota Surabaya tanggal 9 Nopember 2020;
 9. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 25 Nopember 2020;
 10. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/19809/013.4/2020, tanggal 23 Nopember 2020 Perihal : Penyampaian Hasil Konsultasi terkait Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 11. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya tanggal 26 Nopember 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021.**
- KESATU** : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dituangkan dalam Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Nopember 2020

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,

ttd.

A.HERMAS THONY

Salinan sesuai dengan aslinya



Plt. SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,

Mutandar Rachman
Mutandar Rachman, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660111 199602 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD SURABAYA
 NOMOR : 36 Tahun 2020
 TANGGAL : 26 Nopember 2020

A. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH PRAKARSA DPRD KOTA SURABAYA TAHUN 2021

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perubahan Perda No. 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame		V					1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang; 2. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan;	Komisi A
2.	Pengelolaan Pasar di Kota Surabaya		V					1. Dinas Perdagangan; 2. Badan Perencanaan Pembangunan; 3. Dinas Pengelolaan bangunan dan tanah;	Komisi B
3.	Pengelolaan Rusun, Apartemen, dan Kondominium		V					1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;	Komisi C

								<ul style="list-style-type: none"> 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; 3. Badan Perencanaan dan Bangunan; 4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 5. Bagian Hukum; 6. Bagian Administrasi Pembangunan; 7. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset. 	
4.	Ketenagakerjaan		V					Dinas Tenaga Kerja;	Komisi D
5.	Perencanaan dan Penganggaran Terpadu		V					<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah. 	BPP

6.	Pengelolaan Fasum		V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; 3. Badan Perencanaan dan Bangunan. 	Komisi A
7.	Manajemen Kontruksi		V				<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; 3. Badan Perencanaan dan Bangunan; 4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan; 5. Bagian Hukum; 6. Bagian Administrasi Pembangunan; 	Komisi C

								7. Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset.	
8.	Percepatan Penanggulangan Kemiskinan		V					Dinas Sosial	Komisi D
9.	Pembentukan Produk Hukum Daerah							Bagian Hukum.	BPP
10.	Pelayanan Perpustakaan		V					Dinas Perpustakaan.	Komisi A
11.	Ijin Penyelenggaraan Rumah Hiburan Umum (RHU)		V					1. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang ; 2. Badan Perencanaan Pembangunan; 3. Dinas Pengelolaan bangunan dan tanah.	BPP
12.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan	Perda Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2010	V					1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak; 2. Bagian Hukum; 3. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah;	BPP

								4. Badan Perencanaan Pembangunan	
13.	Pengelolaan Sampah Medis		V					1. Dinas Kesehatan; 2. Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau; 3. Dinas Lingkungan Hidup; dan 4. RSUD.	BPP
14.	Ekonomi Kreatif	Ekonomi Kreatif	V					1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 2. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah; 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu; dan 5. Dinas Perdagangan	Komisi B

15.	Penyelenggaraan Angkutan Publik	Penyelenggaraan Angkutan Publik	V					1. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 2. Dinas perhubungan	Komisi C
16.	Kepemudaan	Kepemudaan						1. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga; 2. Dinas Pendidikan; dan 3. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Komisi D
17.	Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Surabaya	Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Surabaya	V			V		1. Dinas Tenaga Kerja; dan 2. Dinas Sosial	BPP
18.	Pelayanan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Pelayanan Bidang Perdagangan dan Perindustrian	V			V		1. Dinas Perdagangan; 2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro; 3. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 4. Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah	Komisi B
19.	Sistem Kesehatan Daerah	Sistem Kesehatan Daerah	V			V		1. Dinas Tenaga Kerja;	Komisi D

								<ul style="list-style-type: none"> 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak; 3. Badan Perencanaan Pembangunan; dan 4. Dinas Koperasi dan usaha Mikro 	
20.	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)	Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR)		V		V		<ul style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan; 2. Dinas Sosial; 3. Dinas Perhubungan; 4. Bagian Administrasi Pembangunan; dan 5. Bagian Hukum 	
21.	Tempat Hunian Berimbang	Tempat Hunian Berimbang		V				<ul style="list-style-type: none"> 1. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang; dan 2. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah 	

B. DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH USULAN PEMERINTAH DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		Perangkat Daerah/ Unit kerja/ Pemrakarsa	KETERANGAN
			BARU	UBAH		Naskah Akademik	Penjelasan atau Keterangan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal	Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Perhubungan	
2.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir	Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta kondisi-kondisi saat ini		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Perhubungan	
3.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta kondisi-kondisi saat ini		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Perhubungan	

4.	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta kondisi-kondisi saat ini		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Perhubungan	
5.	Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Penyesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang terbaru serta kondisi-kondisi saat ini	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	V		Dinas Pemadam Kebakaran	
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Penambahan objek retribusi pelayanan tera/tera ulang		V	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;		V	Dinas Perdagangan	

					3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal				
7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tempat Pemakaman dan Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah	Penyesuaian substansi terkait pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus, tempat pengabuan (krematorium) dan penyelenggaraan pemakaman jenazah	V		-		V	Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau	
8.	Taman Hutan Raya	Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya	V		Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	V		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
9.	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Surabaya	V		Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/PERMENTAN/PK.350/5/2017 tentang Obat Hewan	V		Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	

10.	Penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian	Rencana penggabungan Kelurahan Perak Utara dan Kelurahan Perak Timur pada Kecamatan Pabean Cantian di Kota Surabaya	V		Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan	V		Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
11.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034	Revisi 5 tahunan terhadap arahan rencana pola ruang dan struktur ruang utama Kota Surabaya yang dilengkapi dengan arahan peraturan zonasi		V	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah untuk dilakukan peninjauan kembali RTRW paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun		V	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	

12.	Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	Penambahan obyek retribusi izin mendirikan bangunan		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang	
13.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Penambahan obyek retribusi pemakaian kekayaan daerah		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	1. Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah; 1. Dinas Perhubungan; 2. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	
14.	Pengelolaan Cagar Budaya	Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	V		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.	
15.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Penambahan jenis/obyek dan penyesuaian tarif pelayanan kesehatan di unit kerja Dinas Kesehatan Kota Surabaya		V	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah		V	Dinas Kesehatan	

16.	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba	Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba di Kota Surabaya	V		Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	V		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
17.	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		V	Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		V	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah	
18.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2006 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan	Penyesuaian dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas		V	Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisa Dampak Lalu Lintas		V	Dinas Perhubungan	

4.	Daftar Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka akibat perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Program Pembentukan Perda ditetapkan.	-	-	-	-	-	-	-	-
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 26 Nopember 2020

**WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**

ttd.

A. HERMAS THONY

Salinan sesuai dengan aslinya

**Pt. SEKRETARIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURABAYA,**


Mutandar Rachman
**Mutandar Rachman, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660111 199602 1 002**